

## DANA ALOKASI UMUM, DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI KHUSUS DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI BALI

Ida Bagus Dwi Putra<sup>1</sup>

A. A. N. B. Dwirandra<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia  
email: [dwialerz@yahoo.com](mailto:dwialerz@yahoo.com)/ tlp. 081916593024

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia  
email: [dwirandra2012@gmail.com](mailto:dwirandra2012@gmail.com)/ tlp. 081916483922

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Daerah serta untuk mengonfirmasi terjadinya fenomena *flypaper effect* pada keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Penelitian ini dilakukan pada periode tahun anggaran 2005-2012. Data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil Penelitian ini menemukan bahwa Dana Alokasi umum, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan pada Belanja Daerah, sedangkan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif tidak signifikan pada Belanja Daerah. Fenomena *flypaper effect* tidak terjadi pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali terbukti dengan nilai koefisien regresi Dana Alokasi Umum yang lebih kecil dari nilai koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah.

**Kata kunci:** Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah

### ABSTRACT

*This study was conducted to determine the influence of the General Allocation Fund, Sharing Funds, Special Allocation Fund and Regional Income in Local Expenditure as well as to confirm the occurrence of the phenomenon of flypaper in the government's financial district / city in the province of Bali. This research was conducted in budget year 2005-2012, using secondary data. The analysis technique used was multiple linear regression. The results of this study found that the general allocation fund, sharing funds and local revenue positive and significantly effect on regional spending, while the Special Allocation Fund was not a significantly positive effect on regional spending. There was not Flypaper phenomenon in local department of Bali province proved by regression coefficients of general funds that smaller than those of local own revenue.*

**Keywords:** *General Allocation Fund, Sharing Funds, Special Allocation Fund, Local Revenue, Regional Spending*

## PENDAHULUAN

Pemerintah daerah dituntut untuk bisa lebih mandiri dalam mengelola penerimaan daerah yang ditujukan untuk proses restrukturisasi pembangunan daerah. Meningkatkan Belanja Daerah merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, melalui Belanja Daerah pemerintah daerah membangun fasilitas-fasilitas publik dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap publik. Pembangunan fasilitas akan memicu pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai Belanja Daerahnya. Kejadian ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Pemerintah mengatasi ketimpangan fiskal ini, dengan cara mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Abdul Halim dan Syam Kusufi (2012) menyatakan bahwa APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu dan di pihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud. Kusreni (2009) menyatakan bahwa peran strategis pemerintah daerah melalui APBD sebagai implementasi dari kebijaksanaan keuangan daerah diharapkan berperan efisien dan

efektif dalam mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Tercermin dalam tiga kebijaksanaan pokok, yakni kebijaksanaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Penting untuk mengamati seberapa besar ketiga kebijaksanaan APBD tersebut berperan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 10 menyatakan bahwa yang menjadi sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah (*capital investment*) antara lain berasal dari PAD dan Dana Perimbangan yang diterima oleh daerah-daerah dari pemerintah pusat. Dana Perimbangan itu sendiri terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Maimunah (2006) menyatakan bahwa kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Seharusnya dana transfer dari pemerintah pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kebijakan penggunaan dana tersebut sudah seharusnya pula secara transparan dan akuntabel. Berdasarkan berlakunya desentralisasi maka pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah. Ebit Julitawati, dkk. (2012) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang

pungggung pembiayaan daerah. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah agar dapat menjadi sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utama sehari-hari. Afrizawati (2012) menyebutkan bahwa permasalahan yang terjadi saat ini, pemerintah daerah terlalu menggantungkan alokasi dari pemerintah pusat untuk membiayai belanja modal dan pembangunan tanpa mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah. Permasalahan yang muncul akibat ketergantungan pemerintah daerah kepada dana hibah dari pemerintah pusat tersebut memicu terjadinya fenomena *flypaper effect* pada keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui pengaruh positif Dana Alokasi Umum pada Belanja Daerah di Kabupaten/Kota - Provinsi Bali.
- 2) Mengetahui pengaruh positif Dana Bagi Hasil pada Belanja Daerah di Kabupaten/Kota - Provinsi Bali.
- 3) Mengetahui pengaruh positif Dana Alokasi Khusus pada Belanja Daerah di Kabupaten/Kota - Provinsi Bali.
- 4) Mengetahui pengaruh positif Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Daerah di Kabupaten/Kota - Provinsi Bali.

- 5) Mengkonfirmasi terjadinya fenomena *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah di Kabupaten/Kota - Provinsi Bali.

Dana Alokasi Umum merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Dana transfer pemerintah ini menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah Semakin besar Dana Alokasi Umum yang diterima oleh pemerintah daerah maka hal tersebut menunjukkan daerah masih bergantung pada pemerintah pusat. Transfer dari pemerintah pusat diharap mampu meningkatkan alokasi Belanja Daerah untuk meningkatkan pelayanan publik. Hal ini diperkuat oleh penelitian Askam Tuasikal (2008) dan Afrizawati (2012) yang menunjukkan Dana Alokasi Umum berpengaruh pada Belanja Daerah. Dengan demikian maka hipotesis yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan pada Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil yang diperoleh pemerintah daerah diharapkan mampu untuk meningkatkan alokasi Belanja Daerah guna meningkatkan pelayanan publik bagi daerah sebagai tujuan dari desentralisasi. Hal ini diperkuat oleh penelitian Masdjojo dan Sukartono (2009) yang menyatakan Dana Bagi Hasil berpengaruh pada Belanja Daerah. Dengan demikian maka hipotesis yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Dana Bagi Hasil berpengaruh positif signifikan pada Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Dana Alokasi Khusus adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus bertujuan untuk mendanai kebutuhan-kebutuhan daerah yang bersifat khusus. Sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004, yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan yang tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, contohnya kebutuhan di daerah transmigrasi, pembangunan jalan di daerah terpencil, saluran irigasi. Hal ini diperkuat oleh penelitian Askam Tuasikal (2008) dan Kristina Handayani (2009) yang menyatakan Dana Alokasi Khusus berpengaruh pada Belanja Daerah. Dengan demikian maka hipotesis yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan pada Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Berdasarkan berlakunya desentralisasi maka Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan

di daerahnya melalui pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan penting untuk pemerintah dalam memenuhi belanja daerah dan menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas daerah serta program-program pembangunan daerah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang didapat semakin mandiri daerah tersebut, sehingga tidak harus tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini diperkuat oleh penelitian Askam Tuasikal (2008), Afrizawati (2012) dan Ida Mentayani, dkk. (2012) yang menyatakan bahwa bila Pendapatan Asli Daerah meningkat maka berpengaruh pada Belanja Daerah. Dengan demikian maka hipotesis yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

H<sub>4</sub>: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan pada Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Umum yaitu dana transfer dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah. Berdasarkan konteks desentralisasi fiskal, transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Namun permasalahan yang terjadi pemerintah daerah cenderung menggantungkan Dana Alokasi umum untuk Belanja Daerah tanpa mengoptimalkan potensi-potensi asli daerah. Hal ini menyebabkan terjadinya *Flypaper Effect* dimana yang seharusnya Dana Alokasi Umum menjadi rangsangan untuk peningkatan kemandirian daerah justru direspon berbeda sehingga menjadi ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Hasil

penelitian dari Masdjojo dan Sukartono (2009), Kristina Handayani (2009) dan Afrizawati (2012) menyatakan bahwa terdapat fenomena *flypaper effect* pada Belanja Daerah di beberapa daerah di Indonesia. Dengan demikian maka hipotesis yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

H<sub>5</sub>: Terdapat fenomena *flypaper effect* pada Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Lokasi penelitian dilakukan di Badan Pusat Statistik Provinsi Bali dan Biro Keuangan Provinsi Bali. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode tahun 2005-2012, serta mengamati fenomena *flypaper effect* yang terjadi di Provinsi Bali.

Variabel terikat dari penelitian ini adalah Belanja Daerah (Y). Variabel Bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel bebas dari penelitian ini adalah Dana Alokasi Umum (X<sub>1</sub>), Dana Bagi Hasil (X<sub>2</sub>), Dana Alokasi Khusus (X<sub>3</sub>) dan Pendapatan Asli Daerah (X<sub>4</sub>).

Metode yang digunakan dalam penentuan sampel penelitian ini adalah metode *sampling jenuh*, yaitu dimana semua anggota populasi digunakan sampel



penelitian. Metode pengumpulan data penelitian ini yaitu metode observasi non partisipan. Metode ini merupakan sebuah teknik pengumpulan data dengan cara penelitian melakukan pengamatan di mana penelitian ini tidak secara langsung terlibat dan penelitian sebagai pengamat independent. Penelitian ini menggunakan studi pustaka sebagai metode pengumpulan datanya serta analisis data menggunakan uji statistik regresi berganda, dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

- Y = Belanja Daerah
- $\alpha$  = Konstanta
- X1 = Dana Alokasi Umum
- X2 = Dana Bagi Hasil
- X3 = Dana Alokasi Khusus
- X4 = Pendapatan Asli Daerah
- $\epsilon$  = Variabel Pengganggu

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai deskripsi statistik dapat memberi penjelasan mengenai nilai minimum, nilai maksimum dan nilai rata-rata dari data penelitian, yang disajikan dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 1.**  
**Hasil Deskripsi Statistik**

Model	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata
DAU	72	130.689.490.000	684.679.690.000	334.180.880.000
DBH	72	14.192.510.000	186.560.090.000	44.642.860.000
DAK	72	218.170.000	65.768.200.000	33.945.620.000
PAD	72	7.692.950.000	1.870.187.270.000	171.565.040.000
BD	72	38.317.650.000	2.334.080.290.000	665.915.000.000

Sumber: data diolah 2015

Berdasarkan Tabel 1 di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Dana Alokasi Umum rata-rata pada kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2005-2012 adalah sebesar 334.180.880.000 rupiah, minimum sebesar 130.689.490.000 rupiah dan maksimum sebesar 684.679.690.000 rupiah.
- 2) Dana Bagi Hasil rata-rata pada kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2005-2012 adalah sebesar 44.642.860.000 rupiah, minimum sebesar 14.192.510.000 rupiah dan maksimum sebesar 186.560.090.000 rupiah.
- 3) Dana Alokasi Khusus rata-rata pada kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2005-2012 adalah sebesar 33.945.620.000 rupiah, minimum sebesar 218.170.000 rupiah dan maksimum sebesar 65.768.200.000 rupiah.
- 4) Pendapatan Asli Daerah rata-rata pada kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2005-2012 adalah sebesar 171.565.040.000 rupiah, minimum sebesar 7.692.950.000 rupiah dan maksimum sebesar 1.870.187.270.000 rupiah.
- 5) Belanja Daerah rata-rata pada kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2005-2012 adalah sebesar 665.915.000.000 rupiah, minimum sebesar 38.317.650.000 rupiah dan maksimum sebesar 2.334.080.290.000 rupiah.

Sebelum model regresi digunakan untuk menguji hipotesis, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian ketepatan model penelitian berupa uji asumsi klasik Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel pengganggu (residual) dari model regresi yang dibuat berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov test* yang diperoleh hasil Asymp.Sig.

(2-tailed) sebesar 0,428 lebih besar dari 0,05. Maka, berdasarkan nilai tersebut variabel dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas pada model regresi, dapat dilihat dari *Tolerance Value* atau *Variance Inflation Factor (VIF)*. Model regresi yang bebas dari multikolinearitas adalah yang memiliki *Tolerance Value* diatas 0,1 atau nilai VIF dibawah 10 (Ghozali, 2012). Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,1 dan tidak ada yang memiliki nilai VIF lebih besar dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel bebas.

Uji autokorelasi dalam penelitian ini dilihat dari nilai Durbin Watson. Apabila menunjukkan nilai Durbin Watson sebesar 1,758 dan nilai tersebut berada di antara  $dU$  dan  $(4-dU)$  atau 1,758 lebih besar dari 1,74 dan lebih kecil dari 2,26. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi linier tersebut tidak terdapat autokorelasi atau tidak terjadi korelasi di antara kesalahan pengganggu.

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu observasi ke observasi lain. Uji ini dilakukan untuk meregresi nilai *absolute residual* dengan variabel independennya. Model regresi yang baik adalah regresi yang tidak terdapat heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas, menunjukkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam

penelitian ini. Dilihat dari nilai signifikansi masing-masing variabel bernilai  $> 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

Analisis linier berganda digunakan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, dimana variabel bebas dalam penelitian ini adalah Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Adapun hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS adalah sebagai berikut :

$$\hat{Y} = 0,000 + -0,485X_1 + 0,144X_2 + 0,012X_3 + 0,784X_4$$

Uji kelayakan model regresi berganda yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian ini telah dilakukan dan diperoleh hasil nilai  $P\text{-value} = 0,000$  signifikan pada  $\alpha=5\%$ . Dengan demikian dapat dikatakan model regresi berganda penelitian ini telah memenuhi uji kelayakan model. R square ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya. Nilai  $R^2$  sebesar 0,955 atau 95,5%. Ini berarti variabel independen Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh pada Belanja Daerah sebesar 95,5%, sisanya 4,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

Uji parsial (uji t) digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

**Tabel 2.**  
**Uji t**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-5.696E-17	.026		.000	1.000
Dana Alokasi Umum	.485	.034	.485	14.309	.000
Dana Bagi Hasil	.144	.045	.144	3.173	.002
Dana Alokasi Khusus	.012	.037	.012	.330	.742
Pendapatan Asli Daerah	.784	.044	.784	17.930	.000

Sumber: data diolah 2015

Pada Tabel 2 dapat dilihat hasil uji pengaruh Dana Alokasi Umum ( $X_1$ ) pada Belanja Daerah (Y) diperoleh *p-value* sebesar 0,000 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan pada Belanja Daerah. Nilai koefisien regresi Dana Alokasi Umum ( $X_1$ ) sebesar 0,485 menunjukkan adanya pengaruh positif Dana Alokasi Umum pada Belanja Daerah.

Pada Tabel 2 dapat dilihat hasil uji pengaruh Dana Bagi Hasil ( $X_2$ ) pada Belanja Daerah (Y) diperoleh *p-value* sebesar 0,002 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan pada Belanja Daerah. Nilai koefisien regresi Dana Bagi Hasil ( $X_2$ ) sebesar 0,144 menunjukkan adanya pengaruh positif Dana Alokasi Umum pada Belanja Daerah.

Pada Tabel 2 dapat dilihat hasil uji pengaruh Dana Alokasi Khusus ( $X_3$ ) pada Belanja Daerah (Y) diperoleh *p-value* sebesar 0,742 lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  sebesar. Hal ini berarti bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan pada Belanja Daerah, artinya Dana Alokasi Khusus tidak mampu meningkatkan Belanja

Daerah. Nilai koefisien regresi Dana Alokasi Khusus ( $X_3$ ) sebesar 0,012 menunjukkan adanya pengaruh positif Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah

Pada Tabel 2 dapat dilihat hasil uji pengaruh Pendapatan Asli Daerah ( $X_4$ ) pada Belanja Daerah ( $Y$ ) diperoleh *p-value* sebesar 0,000 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan pada Belanja Daerah. Nilai koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah ( $X_4$ ) sebesar 0,784 menunjukkan adanya pengaruh positif Dana Alokasi Umum pada Belanja Daerah.

Berdasarkan Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa koefisien Beta Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 0,784 lebih besar dari pada koefisien Beta Dana Alokasi Umum yaitu 0,485. Ini menunjukkan bahwa tidak terjadi fenomena *flypaper effect* pada Belanja Daerah. Hasil penelitian ini gagal mendukung hipotesis kelima yang menyatakan bahwa terjadi fenomena *flypaper effect* pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan pada Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Dana Bagi Hasil berpengaruh positif signifikan pada Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif namun tidak signifikan pada Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan pada Belanja Daerah pada

Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Tidak terjadi fenomena *flypaper effect* pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Ini disebabkan oleh respon Belanja Daerah masih lebih besar disebabkan oleh Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Dana Alokasi Umum.

Saran yang dapat diberikan, pertama Pemerintah provinsi Bali diharapkan lebih mandiri mengingat tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap besarnya transfer Dana Alokasi Umum maka untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, pemerintah daerah harus mengupayakan untuk memaksimalkan potensi daerahnya yang akan berdampak pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah seperti mendorong kinerja industri pariwisata, agroindustri, jasa, dan sektor ekonomi lainnya yang potensial dikembangkan agar sesuai dengan asasdesentralisasi dan prinsip otonomi di manapemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiritanpa bergantung pada pemerintah pusat.

Peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan data yang lebih lengkap dan memperluas rentang waktu penelitian seperti sebelum otonomi dan setelah otonomi di berlakukan, selain itu peneliti selanjutnya juga diharapkan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian yang antara satu provinsi dengan provinsi lainnya untuk melihat apakah terjadinya *flypaper effect* didaerah lain di Indonesia.

## REFERENSI

- Afrizawati. 2012. Analisis *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatra Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi*, 2(1), pp: 21-30.
- Dahlberg, Matz., Eva Mörk, Jørn Rattsø and Hanna Ågren. 2006. Local Taxes and Spanding: Estimating the Flypaper Effect Using a Discontinuous Grant Rule. *Department of Economics, Sweden*, vol. 20.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gramlich, E.M. 1993. A Policy Maker,s Guide to Fiscal Decentralization. *National Tax Journal* 6(2), 229-235.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Selemba Empat.
- Handayani, Kristina. 2009. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Bidang Pendidikan pada Kabupaten/Kota di Sulawesi. *Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta*.
- Hastuti, Indhi. 2011. Analisis *Flypaper Effect* Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). *Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro*.
- Julitawati, Ebit, Darwanis dan Jalaluddin. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi*, 1(1), pp: 1-15.
- Junaidi. 2012. Asimetri pada *Flypaper Effect*: Bukti Empiris Pemanfaatan Dana Alokasi Umum pada Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 14(1), pp: 45-55.
- Kusumadewi, Diah Ayu dan Arief Rahman. 2007. *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Indonesia. *JAAI*, 11(1) pp: 67–80.
- Lane, Jan-Erik. 2000. *The Public Sector – Concepts, Models and Approaches*. London: SAGE Publications.



- Listiorini. 2012. Fenomena *Flypaper Effect* pada Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatra Utara. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, 4(2), pp: 111-126.
- Masdjojo dan Sukartono. 2009. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis *Flypaper Effect* Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2006-2008. *TEMA (Telaah Manajemen)*, 6(1), pp: 32 -50.
- Mentayani, Nuruh Hayati dan Rusmanto. 2012. *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Spread* 2(1) pp: 55-64.
- Moe, T. M. 1984. The new economics of organization. *American Journal of Political Science* 28(5), pp: 739-777.
- Musgrave, DA, dan PB Musgrave. 1973. *Public Finance in Theory and Practice*. McGraw-Hill Kogakusha, Ltd. Tokyo.
- Pevcin, Primož. 2012. Theory and Empirics on The Possible Existence of The Anti Flypaper Effect in Local Government Finances. *University of Ljubljana, Faculty of Administration*.
- Purnomo, Hernawan Bayu. 2011. Flypaper Effect pada Pengaruh Transfer Tidak Bersyarat dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota Di Kalimantan Tahun 2007-2010. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Bandung.
- Putro, Nugroho Suratmo. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Rizky Azzumar, Mochamad. 2011. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Investasi swasta, tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Era Desentralisasi Fiskal Tahun 2005-2009 (Studi Kasus Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah). *Skripsi* Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Tuasikam, Askal. 2008. Pengaruh DAU, DAK, PAD dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, 1(2), h:142-155.